

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN TERHADAP
EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam Bidang
Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi*

Oleh

JULIANI NASUTION
NIM. 13 230 0242

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

PADANGSIDIMPUAN

2017



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN TERHADAP
EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Dijuhkan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam Bidang
Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi*

Oleh

JULIANI NASUTION
NIM. 13 230 0242

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

PADANGSIDIMPUAN

2017



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN TERHADAP EFISIENSI
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Salah Satu Syarat-Syarat Cuna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan*

Oleh

**JULIANI NASUTION
NIM. 13 230 0242**

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818200901 1 015

PEMBIMBING II

Nurul Izzah Lubis, M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2017**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Juliani Nasution**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 13 Oktober 2017
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Juliani Nasution** yang berjudul "**Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Mandailing Natal**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818200901 1 015

PEMBIMBING II

Nurul Izzah Lubis, M.Si

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JULIANI NASUTION
NIM : 13 230 0242
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (6-AK)
Judul Skripsi : **Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Mandailing Natal**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 13 Oktober 2017

Saya yang menyatakan,



JULIANI NASUTION
NIM. 13 230 0242

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

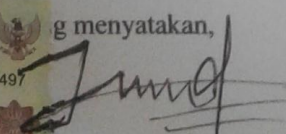
Nama : Juliani Nasution
NIM : 13 230 0242
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Mandailing Natal”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 13 Oktober 2017

g menyatakan,

6000
RIBURUPIAH

JULIANI NASUTION
NIM. 13 230 0242



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : JULIANI NASUTION
NIM : 13 230 0242
Fak/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Ketua

Sekretaris

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M. Si
NIP. 19730818 200901 1 015

Rosnani Siregar, M. Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

Anggota

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M. Si
NIP. 19730818 200901 1 015

Rosnani Siregar, M. Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M
NIP. 19790720 201101 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu/ 01 November 2017
Pukul : 13.30 s/d Selesai
Hasil/Nilai : 66,2/(C)
IPK : 3,19
Predikat : Amat Baik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KINERJA KEUANGAN TERHADAP
EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET
DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**

NAMA : JULIANI NASUTION
NIM : 13 230 0242

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah



Padangsidimpuan, 16 November 2017

Dekan

[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : JULIANI NASUTION
Nim : 13 230 0242
Judul : Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Otonomi daerah (otoda) adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Namun dalam rasio keuangan ini masih ada yang realisasinya minim disebabkan pendapatan asli daerah mengalami penurunan pada tahun tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap efisiensi PAD.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan ilmu akuntansi pada akuntansi sektor publik khususnya kinerja keuangan daerah pada era otonomi daerah. Teori dalam penelitian ini berkaitan dengan penjelasan rasio efisiensi PAD yang mana suatu kinerja keuangan dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif analisis deskriptif. Karena data ini di analisis dengan menerapkan konsep perhitungan rasio keuangan, yaitu dengan menghitung rasio keuangan dari pos-pos dalam realisasi anggaran untuk kinerja keuangan tahun anggaran 2008-2015. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan tahunan selama delapan tahun dan data primer berupa tugas dan struktur organisasi dinas pengelola keuangan dan asset daerah Kabupaten Mandailing Natal. Populasi dalam penelitian ini, yaitu laporan realisasi anggaran pemerintah tahun 2008-2015 Kabupaten Mandailing Natal di mana sampel yang diambil adalah rasio-rasio kinerja keuangan daerah tahun 2008-2015.

Hasil analisis dari uji kolmogrof-smirnof Nilai Asymp Sig (2-tailed) adalah $0,581 > 0,05$ sehingga H_0 ditolak, Jadi model berdistribusi normal sesuai. sedangkan hasil uji Chi-Square dari Asymp Sig $(0.000) < \alpha (0.05)$ maka H_0 ditolak. Dan hasil uji statistik nonparametrik nilai signifikansi ke empat variabel tersebut independen dengan dependen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah pada statistik nonparametriknya.

Kata kunci: Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio pertumbuhan dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbilámin. Seiring dengan atas limpahan rahmat Allah SWT, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Mandailing Natal**”. Serta shalawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan.

Dan penulis menyadari betul bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya usaha, bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Namun dengan petunjuk Allah SWT dan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan apa yang diharapkan.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menanamkan jasa baik berupa bimbingan, arahan, saran, serta bantuan yang diberikan sehingga. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Kepada Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A, Bapak Aswadi Lubis, S.E, M.Si dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor I, II dan III.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr.

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku wakil dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Muhammad Isa, ST., MM selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Ibu Delima Sari Lubis S.E., M.Si Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah serta seluruh civitas akedemika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Nurul Izzah Lubis, M.Si selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Seluruh Staf Akademik, Jurusan, Kasubag, dan Perpustakaan, terimakasih atas bantuan dalam upaya memperlancar penulisan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mandailing Natal yaitu bapak Kamal Rangkuti, S.Sos. MM yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian pada dinas pengelola keuangan dan asset daerah Kabupaten Mandailing Natal.
7. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Zainal Abidin Nasution dan Ibunda Mastiar Lubis yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya, serta berjuang demi kami anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang diharapkan. Tak lupa juga kepada abanganda Imsaruddin Nasution, S.HI, Ali Amrin Nasution, dan kakanda Rodiah Nasution, S.HI serta adik Irsanuddin Nasution dan seluruh keluarga besar penulis yang tak pernah lelah memberikan dorongan dan

motivasi untuk tetap semangat berjuang dan bersabar dalam menyelesaikan studi di kampus IAIN Padangsidempuan ini.

8. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2013, Khususnya Ekonomi Syariah-6AK yang selalu memberikan bantuan, semangat, dorongan, dan motivasi kepada penulis. Serta semua pihak yang telah berperan membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini dan semoga mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda, Amin.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi ilmu dan pengalaman serta dapat mendatangkan manfaat dan berkah kepada semua pihak. Semoga *ridha*-Nya akan tetap menyertai kita semua.

Padangsidempuan, 13 Oktober 2017

Penulis

JULIANI NASUTION
NIM. 13 230 0242

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian

dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Iin	S	es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	..’..	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U




b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitan dasyaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bias dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Definisi Operasional Variabel.....	7
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Manfaat Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori	14
1. Definisi Kinerja Keuangan.....	14
2. Pengukuran Kinerja	14
3. Tujuan Pengukuran Kinerja.....	16
4. Indikator Kinerja.....	17
5. Kinerja Dalam Perspektif Islam.....	18
a. Kinerja	18
b. Pembagian Kinerja Keuangan.	21
a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.	21
b) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli daerah.	21
c) Rasio Pertumbuhan.....	22
d) Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.	22

6. Pendapatan Asli Daerah.....	23
7. Pengelolaan Keuangan Keuangan daerah.....	24
8. Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah.....	24
B. Penelitian Terdahulu.....	25
C. Kerangka Pikir.	31
D. Hipotesis.	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.	34
C. Populasi Dan Sampel.....	35
1. Populasi.....	35
2. Sampel.....	35
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	35
E. Sumber Data.....	37
F. Pengujian Hipotesis.....	38
1. Uji Nonparametrik.....	38
a. Chi-Square.....	39
b. One-Sample Kolmogrof-Smirnof.	40
G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.	40
1. Teknik Pengolahan Data.	41
2. Analisis Data.	41
H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah	45
1. Letak Geografis Kabupaten Mandailing Natal.	45
2. Letak Administratif Kabupaten Mandailing Natal.	45
3. Sejarah Singkat DPKAD Kabupaten Mandailing Natal.	46
4. Visi DPKAD Kabupaten Mandailing Natal.....	46
5. Misi DPKAD Kabupaten Mandailing Natal.	47
6. Tugas Dan Fungsi DPKAD Kabupaten Mandailing Natal.	47
7. Struktur Organisasi DPKAD Kabupaten Mandailing Natal.	48
B. Hasil Penelitian.	50
1. Uji Statistik Nonparametrik.	50
a. Uji Chi-Square.....	53
b. Uji One-Sample Kolmogrof-Smirnof.....	56
C. Pembahasan	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rasio Kinerja Keuangan.....	5
Tabel 1.2 Definisi Operasional Variabel.....	8
Tabel 2.1 Kriteria Kinerja Keuangan.....	23
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 4.1 Hasil Uji Nonparametrik.....	52
Tabel 4.2 Hasil Uji Chi-Square	53
Tabel 4.3 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov Smirnov	57

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1 Grafik Rasio Kinerja Keuangan	5
Tabel 2.3 Kerangka Pikir.	32

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran1 Daftar Data Pendapatan Asli Daerah serta Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mandailing Natal
- Lampiran2 Bagian Susunan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mandailing Natal
- Lampiran 3 Hasil Olah Data Uji Statistik Nonparametrik
- Lampiran 4 Hasil Olah Data Uji Chi-Square
- Lampiran 5 Hasil Olah Data Uji One-Sample Kolmogrof-Smirnof
- Lampiran 6 Hasil Dokumentasi Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mandailing Natal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (pemda) dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah.¹ Menurut Undang-Undang No 22 tahun 1999 Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelola dan pengawasan keuangannya.

Adanya Undang-Undang tersebut telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya.

¹ Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Blu*, (Jakarta : PT Macanan Jaya Cemerlang, 2009) , hlm. 33-34

Sebenarnya pertimbangan mendasar terselenggaranya otonomi daerah adalah perkembangan dari dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (*desentralisasi*). Selain itu, keadaan luar negeri yang banyak menunjukkan bahwa semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk setiap pemerintah daerahnya. Hal tersebut akan tercapai dengan peningkatan kemandirian pemerintah daerah melalui program otonomi daerah. Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan pendapatan adalah semua penerimaan pada bendahara umum daerah atau bendahara penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang

menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan di akui pada saat diterimanya kas oleh bendahara penerimaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Bendahara Umum Daerah di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah ia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.²

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dilaksanakan. Hasil analisis rasio keuangan pun digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Serta mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.³ Dan mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.

² Irwan Taufik Ritonga, *Akuntansi Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2010), hlm. 31.

³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2002), hlm. 121.

Serta mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, penggunaan analisis rasio pada sektor publik, khususnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan realisasinya belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.⁴ Namun analisis rasio terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Di samping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas otonomi daerah sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan.

Dimana kinerja keuangan itu terdiri dari beberapa rasio yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan rasio pertumbuhan. Berikut tabel dari rasio-rasio tersebut :

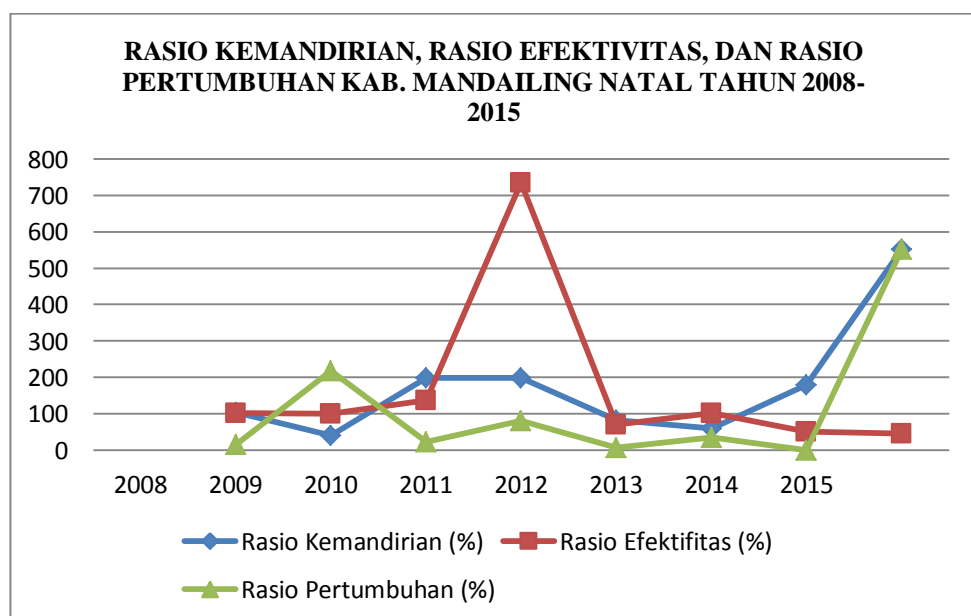
⁴ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta : Salemba Empat, 2004), hlm. 276

Tabel 1. 1
Laporan Keuangan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Pertumbuhan, Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2008-2015.

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Rasio Efektifitas (%)	Rasio Pertumbuhan (%)
2008	80.44	101.52	140.87
2009	40.91	100.28	218.66
2010	98.93	136.51	22.21
2011	98.18	734.23	80
2012	81.85	69.58	7.49
2013	60.48	10.23	35.14
2014	178.65	50.19	0.53
2015	552.83	46.40	52.83

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

Gambar 1.1
Grafik rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan, Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2008-2015



Berdasarkan grafik dan tabel di atas, yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mandailing Natal jika dilihat dari rasio keuangan terhadap APBD untuk rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun anggaran 2010-2015 mencapai angka antara 198,93 persen - 552,83 persen sehingga kategori rasio kemandirian baik jika berada pada posisi diatas 100 persen.⁵ Dan kinerja keuangan rasio efektivitas dari tahun 2008-2015 mencapai angka antara 101,52 persen - 46,40 persen sehingga dikatakan masih kurang efektif karena rasio yang dicapai kurang dari 100 persen, terjadinya penurunan mulai dari tahun 2012 disebabkan target pendapatan asli daerah masih ada yang realisasinya minizm.

Kinerja rasio pertumbuhan dari tahun 2008-2015 mengalami kenaikan pada tahun 2008-2009 dan 2010-2014 mengalami penurunan, menunjukkan semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode ke periode berikutnya karena rasio yang diperoleh selalu mengalami naik turun. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membuktikan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam mengelola keuangan daerahnya dan melihat dari efisiensi PAD maka penulis mengangkat judul penelitian **“Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Mandailing Natal”**.

⁵ Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2008-2015

B. Identifikasi Masalah

Ditinjau dari latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah yaitu diantaranya adalah:

1. Naiknya rasio kemandirian dari tahun 2010-2015 menyebabkan rasio kemandirian sangat tinggi melebihi 80 persen kriteria efisiensi PAD.
2. Menurunnya rasio efektivitas dari tahun 2012-2015 menyebabkan rasio yang kurang efektif yaitu kurang dari 100 persen.
3. Naiknya rasio pertumbuhan dari tahun 2008-2009 menyebabkan rasio pertumbuhan sangat tinggi melebihi 80 persen kriteria efisiensi PAD.

C. Batasan Masalah

Banyak rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan namun dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2008-2015.

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel bertujuan untuk memudahkan pengukuran atau penilaian variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam definisi operasional variabel dibuat beberapa indikator yang mendukung variabel-variabel penelitian serta skala yang digunakan untuk melakukan pengukuran maupun penelitian.

Tabel 1. 2
Definisi Operasional Variabel

Variabel		Definisi	Indikator	Skala
Variabel independen	Rasio Kemandirian	Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan pembangunan, dan pelayanan masyarakat.	$\frac{\text{Rasio Kemandirian} = \text{PAD}}{\text{Bantuan pusat \& pinjaman}}$	Rasio
	Rasio efektifitas	Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.	$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target penerimaan PAD}}$	Rasio
	Rasio Pertumbuhan	Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.	$\text{PAD} = \frac{\text{PADt1} - \text{PADt0}}{\text{PADt0}}$	Rasio

Variabel dependen	Rasio efisiensi PAD	Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. ⁶	Rasio Efisiensi = <u>Biaya pemungutan</u> Realisasi penerimaan	Rasio
-------------------	---------------------	---	--	-------

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah rasio kemandirian keuangan daerah pada dinas pengelola keuangan dan asset daerah Kabupaten Mandailing Natal sudah dikatakan efisien ?
2. Apakah rasio efektivitas pendapatan asli daerah pada dinas pengelola keuangan dan asset daerah Kabupaten Mandailing Natal sudah dikatakan efisien ?
3. Apakah rasio pertumbuhan pada dinas pengelola keuangan dan asset daerah Kabupaten Mandailing Natal sudah dikatakan efisien ?

⁶Abdul Halim, *Op. Cit.*, hlm. 277.

F. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian ini, maka adapun tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah pada dinas pengelola keuangan dan asset daerah sudah dikatakan efisien.
2. Untuk mengetahui rasio efektivitas pendapatan asli daerah pada dinas pengelola keuangan dan asset daerah Kabupaten Mandailing Natal sudah dikatakan efisien .
3. Untuk mengetahui rasio pertumbuhan pada dinas pengelola keuangan dan asset daerah Kabupaten Mandailing Natal sudah dikatakan efisien.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai bahan informasi, menambah pengetahuan dalam bidang penatausahaan keuangan, serta bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan dalam rangka upaya peningkatan kinerja keuangan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

3. Bagi Dunia Akademik

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan referensi dalam bidang ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik penatausahaan keuangan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini dijabarkan sistematika pembahasan penelitian yang terdiri dari lima bab. Hal ini dimaksudkan untuk penulisan laporan penelitian yang sistematis, jelas dan mudah dipahami. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam pendahuluan membahas hal yang melatar belakangi suatu masalah untuk diteliti. Masalah yang muncul tersebut akan diidentifikasi kemudian memilih beberapa poin sebagai batasan masalah yang telah ditentukan akan dibahas mengenai definisi dan skala pengukuran berkaitan dengan variabelnya. Kemudian dari identifikasi dan batasan masalah yang ada, maka masalah akan dirumuskan sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut yang nantinya penelitian akan berguna bagi peneliti, perguruan tinggi dan lembaga terkait.

BAB II Landasan Teori, yang terdiri dari kerangka teori yaitu teori tentang kinerja keuangan, penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan hipotesis. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam landasan

teori membahas tentang penjelasan-penjelasan yang mengenai variabel penelitian secara teori yang dijelaskan dalam kerangka teori. Kemudian teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian tersebut akan dibandingkan dengan pengablikasiannya sehingga akan terlihat jelas masalah yang terjadi. Setelah itu, penelitian ini akan dilihat dan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang sama. Teori yang ada tentang variabel penelitian akan digambarkan bagaimana perbandingan antara variabel dalam bentuk kerangka pikir. Kemudian membuat hipotesis yang merupakan jawaban sementara tentang penelitian.

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, instrument pengumpulan data dan analisis data. Secara umum, seluruh sub bahasa yang ada dalam metode penelitian membahas tentang lokasi dan waktu penelitian serta jenis penelitian. Setelah itu akan ditentukan populasi ataupun yang berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian peneliti untuk diteliti dan memilih beberapa atau seluruh populasi sebagai sampel dalam penelitian. Data-data yang dibutuhkan akan dikumpulkan guna memperlancar pelaksanaan peneliti. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya adalah melakukan analisis data sesuai dengan berbagai uji yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

BAB IV Hasil Penelitian, yang terdiri dari deskripsi data penelitian, hasil analisis penelitian, dan pembahasan penelitian. Secara umum, seluruh sub bahasa yang ada dalam hasil penelitian adalah membahas tentang hasil penelitian. Mulai dari pendeskripsian data yang akan diteliti secara rinci, kemudian melakukan analisis data menggunakan teknik analisis data yang sudah dicantumkan dalam bab III sehingga diperoleh hasil analisa yang dilakukan dan membahas tentang hasil yang telah diperoleh.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam penutup adalah membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini setelah menganalisis data dan memperoleh hasil dari penelitian ini. Hal ini merupakan langkah akhir dari penelitian dengan membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi Kinerja Keuangan

Menurut Jumingan (2006) “kinerja keuangan adalah gambaran prestasi yang dicapai pemerintah dan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghasilan dan penyaluran dana, aspek teknologi maupun aspek sumber daya manusianya”.¹

2. Pengukuran Kinerja

Setelah dilakukannya operasionalisasi anggaran maka yang akan dilakukan kemudian adalah pengukuran kinerja dimana untuk menilai prestasi yang telah dicapai dalam unit organisasi yang dipimpin. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi tersebut.² Prestasi kerja sebagai suatu sistem yang bersifat formal yang dilakukan secara periodik untuk mereview dan mengevaluasi kinerja pegawai. Penilaian prestasi kerja adalah suatu cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja pegawai dengan serangkaian tolok ukur tertentu yang obyektif dan berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta dilakukan secara berkala. Penilaian unjuk kerja adalah uraian

¹Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hlm. 36

²Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), hlm.

sistematik tentang kekuatan/kelebihan dan kelemahan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang atau sebuah kelompok.

Manfaat pengukuran kinerja :

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaiki kinerja.
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
- h. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah, dan
- i. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.³

³ *Ibid.*, hlm. 122.

3. Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik (*feed back*) sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.⁴

Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk :

- a. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
- b. Memastikan tercapainya skema yang disepakati.
- c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dan membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
- d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah disepakati.
- e. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

⁴ *Ibid.*, hlm. 143.

- i. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
- j. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

4. Indikator Kinerja

Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan.⁵ Adapun pertimbangan tersebut yaitu untuk tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundangn – undangan, dan sebagainya.
- b. Indikator keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
- c. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung)
- d. Indikator manfaat (*benefits*) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

⁵ *Ibid.*, hlm. 130.

- e. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

5. Kinerja Dalam Perspektif Islam

a. Kinerja

Pengertian kinerja atau prestasi kerja ialah kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam arti lebih luas kerja diartikan sebagai semua bentuk aktivitas kita yang membawa benefit baik materi maupun non-materi. Hanya saja, telah terjadi penyempitan atas kata kerja ini. Banyak orang lebih memandang suatu aktivitas itu bagian dari kerja atau bukan dilihat dari materi yang dihasilkan, namun islam adalah agama yang sangat memberikan penghargaan terhadap kerja. Kerja bukan sekedar aktivitas yang bersifat duniawi tetapi juga memiliki nilai transendensi.⁶ Seruan bekerja dalam konteks ekonomi untuk menjemput rezeki terdapat dalam al-Qur'an surah al-jumu'ah ayat 10 yaitu :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.⁷

⁶ Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 76

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor : SYGMA 2007), hlm. 554.

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Inti dari ayat yang akan dibahas adalah masalah pembagian waktu shalat dan bekerja. Jadi dalam ayat tersebut memberikan keleluasaan dalam mencari penghidupan dengan jalan perniagaan yang diridhai-nya, “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.” Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa Irak bin Malik bila, bila telah selesai shalat jum’at dia segera bangkit pulang dan didepan pintu dia segera bangkit pulang dan di depan pintu dia berhenti untuk berdoa, “ Ya Allah sesungguhnya aku telah memenuhi panggilanmu, telah aku laksanakan shalat yang menjadi kewajiban darimu dan akupun hendak bertebaran di muka bumi sebagaimana engkau perintahkan. Maka anugerahkanlah rezeki kepadaku dari karunia-mu dan engkau sebaik-baiknya pemberi rezeki.”⁸

Al- Qur’an juga telah memberikan penekanan yang lebih terhadap manusia tentang rasio keuangan yang di ukur dari kinerja keuangan hal ini diterangkan dalam Q.S *Al-Baqarah* ; 283 sebagai berikut.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ

⁸ Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 76-78.

وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^{قُلْ} وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ رَءِءِثٌ قَلْبُهُ^ع وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ^ع

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁹

Dari ayat di atas menjelaskan bagaimana transaksi tidak tunai yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (*borg*) yang dipegang oleh yang berpiutang. Barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai juga sebagai pemenuhan prinsip kehati-hatian. Kecuali masing-masing pihak saling percaya dan menyerahkan diri kepada Allah, maka transaksi itu boleh dilakukan tanpa adanya *borg* karena yang berutang akan membayar.¹⁰ Jangan sekali-kali menyembunyikan kesaksian, karena menyembunyikannya kesaksian itu tanda hati masih kotor dan suka menyimpan niat buruk, Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Dari penjelasan di tarik kesimpulan bahwa perlu

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor : SYGMA 2007), hlm. 49.

¹⁰ Dwi Swiknyo, *Op., Cit*, hlm. 242.

memperbaiki kinerja keuangan perusahaan maka hasil yang diperoleh adalah memuaskan dan akan memperoleh banyak keuntungan.¹¹

Dengan demikian setiap pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah antara lain: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio pertumbuhan dan rasio efisiensi pendapatan asli daerah.¹²

a) Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio ini menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

b) Rasio efektivitas pendapatan asli daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 242

¹² Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hlm. 278-284.

c) Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

d) Efisiensi pendapatan asli daerah (PAD)

Efisiensi pendapatan asli daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.¹³

¹³ *Ibid.*, hlm. 279

Tabel 2. 1
Kriteria kinerja keuangan yang dikatakan efisien

Kriteria efisiensi	Persentase efisiensi
100 % keatas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat efisien

6. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut :

1. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi.

3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain pendapatan yang sah

Pada peraturan sebelumnya yaitu kepmendagri nomor 29 tahun 2002, pendapatan ini dikelompokkan dalam jenis pendapatan bantuan dana kontinjensi/penyeimbang dari pemerintah dan dana darurat.¹⁴

Dimana akibat diterapkannya dua basis akuntansi yang berbeda pada kedua pelaporan, yaitu pelaporan pelaksanaan anggaran berbasis kas dan pelaporan finansial berbasis akrual, maka pendapatan juga dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan-LO dan pendapatan-LRA. Pendapatan-LO merupakan akun pendapatan yang ditujukan untuk laporan operasional dan berbasis akrual. Sedangkan pendapatan-LRA merupakan akun pendapatan yang ditujukan untuk laporan realisasi anggaran berbasis kas. Kedua pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut asal dan jenis untuk pemerintah daerah, sebagaimana telah dijelaskan diatas.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah

Isal Amri (2007) pemerintah daerah umumnya belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi seperti ini muncul karena pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan besar alokasi dana untuk setiap kegiatan adalah pendekatan inkremental, yang

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 101-105

didasarkan pada perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk.¹⁵

8. Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan undang-undang yang berlaku.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, dengan menggunakan konsep nilai uang (*value for money*) serta prinsip tata pemerintahan yang baik (*good government governance*).

Sesuai dengan pasal 60 peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pasal 130 Peraturan Menteri dalam negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan:

- a) Pengembalian atas kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 121.

- b) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- c) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tak terduga.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan keuangan daerah, antara lain.

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul/Tahun	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Muhammad yogi perwira	Analisis kinerja keuangan pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten klaten periode tahun 2007-2013.	Deskriptif kuantitatif	Kinerja keuangan kabupaten klaten jika dilihat dari rasio efektifitas tahun 2007, 2011, 2012, dan 2013 kinerja keuangan kabupaten klaten sudah efektif. Dan jika dilihat dari rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah untuk tahun 2007-2013 kinerja keuangan kabupaten klaten dapat digolongkan sedang hingga cenderung baik. Sedangkan kinerja keuangan kabupaten klaten jika dilihat dari rasio kemandirian tergolong sangat rendah. Dilihat dari hasil

				perkiraan kinerja keuangan melalui analisis trend untuk rasio efektifitas kinerja keuangan kabupaten klaten menggambarkan kecendrungan arah perkembangan efektifitas dari tahun 2007-2013 yang meningkat dilihat dari analisis trend untuk rasio efektifitas. ¹⁶
2.	Bayu Andri Setiyawan	Analisis kinerja keuangan daerah terhadap efisiensi pendapatan asli daerah kabupaten sidoarjo periode tahun 2007-2011.	Deskriptif kuantitatif	Kinerja Keuangan Kabupaten Sidoarjo dilihat dari rasio efektifitas untuk tahun 2007, 2011, 2012, dan 2013 sudah efektif, karena nilai yang diperoleh lebih dari 100%, yaitu sebesar 101,65%, 100,99%, 109,81%, dan 134,90%. Kinerja keuangan kabupaten klaten dilihat dari rasio kreatifitas untuk tahun 2008, 2009, dan 2010 tidak efektif, karena nilai yang diperoleh kurang dari 100%, yaitu sebesar 87,33%, 70,53%, dan 88,89%. Kinerja keuangan kabupaten klaten dilihat dari rasio pajak daerah terhadap Pendapatan asli daerah

¹⁶ Muhammad Yogi Perwira, "Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Periode Tahun 2007-2013" (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2011).

				<p>untuk tahun 2007 sampai tahun 2013 dapat digolongkan sedang hingga cenderung baik, kinerja keuangan kabupaten klaten yang paling rendah yaitu sebesar 29,82% terjadi pada tahun 2007 yang digolongkan sedang, dan kinerja keuangan kabupaten klaten paling tinggi yaitu sebesar 47,01% terjadi pada tahun 2008 yang digolongkan baik.</p> <p>Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten dilihat dari rasio kemandirian tergolong sangat rendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 4,21%, sedangkan nilai kinerja keuangan kabupaten klaten paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,30%.</p> <p>Analisis trend kinerja keuangan DPPKA Kabupaten Klaten untuk rasio efektifitas dari tahun 2007 hingga tahun 2013 yang semakin meningkat, rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan rasio kemandirian kinerja keuangan kabupaten klaten dari tahun 2007 hingga tahun 2013 menggambarkan</p>
--	--	--	--	---

				kecendrungan arah penerimaan pajak daerah serta kecendrungan arah perkembangan kemandirian keuangan yang cenderung naik dilihat dari analisis trend untuk rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan rasio kemandirian. ¹⁷
3.	Afriyanto	Analisis kinerja keuangan pemerintah rokan hulu tahun 2007-2011.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian tahun 2007-2011 masih sangat rendah, rasio efektifitas kinerja keuangan tahun 2007 tidak efektif, tahun 2008 menunjukkan bahwa kinerja keuangan cukup efektif, tahun 2009 dan 2010 menunjukkan kinerja keuangan sangat efektif, dan tahun 2011 menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah efektif. Rasio efisiensi tahun 2007-2011 menunjukkan bahwa kinerja keuangan sangat efisien karena dibawah angka 1%. Rasio aktivitas tahun 2007 dan 2011 menunjukkan bahwa rasio keserasian di

¹⁷ Bayu Andri Setiyawan, "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Periode Tahun 2007-2011" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012).

				prioritaskan untuk belanja rutin. Rasio pertumbuhan APBD tahun 2007-2011 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan negatif. Karena mengalami kenaikan dan penurunan di tahun tertentu. ¹⁸
--	--	--	--	---

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya atas nama Muhammad Yogi Perwira pada variabel X, sama-sama meneliti tentang kinerja keuangan. Sedangkan variabel Y Pendapatan asli Daerah. Dan perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya. Dimana tempat penelitian saudara Muhammad Yogi Perwira pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Klaten periode 2007-2013. Kemudian variabel X pada penelitiannya menggunakan dua rasio yaitu, rasio efektivitas dan rasio pajak daerah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya atas nama Bayu Andri Setiyawan pada variabel X dan Y, sama-sama meneliti tentang kinerja keuangan terhadap efisiensi pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya. Dimana tempat penelitian saudara Bayu Andri Setiyawan pada pemerintah kabupaten sidoarjo periode 2007-2011. Kemudian variabel X pada penelitiannya menggunakan lima

¹⁸ Afriyanto, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Rokan Hulu Periode Tahun 2007-2011" (Jurnal, Universitas Pasir Pengaraian, 2013).

rasio yaitu, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas pendapatan asli daerah, rasio pertumbuhan, rasio aktivitas dan rasio ekonomis.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya atas nama Afriyanto pada variabel X, sama-sama meneliti tentang kinerja keuangan dan variabel Y pemerintah kabupaten rokan hulu. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya. Dimana tempat penelitian saudara Afriyanto pada pemerintah rokan hulu periode 2007-2011. Kemudian variabel X dalam penelitiannya menggunakan lima rasio yaitu, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

C. Kerangka Pikir

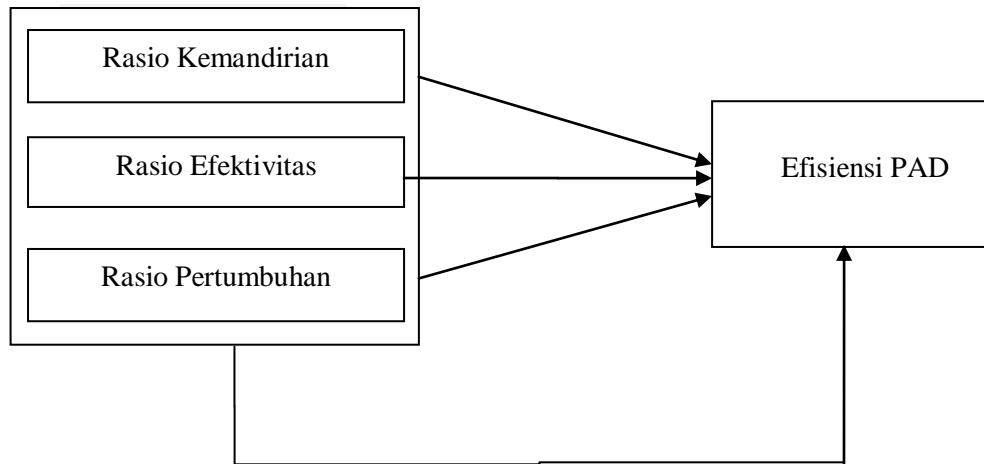
Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Dilihat dari kebijakan-kebijakan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengukuran kinerja keuangan daerah dengan alat analisis sebagai berikut:

- 1) Rasio kemandirian keuangan daerah
- 2) Rasio efektifitas
- 3) Rasio pertumbuhan

Rasio-rasio tersebut akan digunakan untuk melihat kinerja keuangan Kabupaten Mandailing Natal berpengaruh terhadap efisiensi penggunaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan masalah yang ada, maka dapat dibuat suatu kerangka pikir secara sistematis seperti berikut:

Gambar 2. 3
Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.¹⁹

Berdasarkan kerangka berpikir yang ada diatas, maka penulis disini memberikan suatu jawaban sementara atau hipotesis, sebagai berikut:

Ho1 :Rasio kemandirian keuangan daerah pada dinas pengelola keuangan dan asset daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2008-2013 sudah efisien kriteria efisiennya 80,44-60,48 persen.

Ha1 :Rasio kemandirian keuangan daerah pada dinas pengelola keuangan dan asset daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun

¹⁹Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 51.

2014-2015 tidak efisien kriteria tidak efisiennya 178,65-552,83 persen.

Ho2 :Rasio efektivitas pendapatan asli daerah pada dinas pengelola keuangan dan asset daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2012-2015 sudah efisien kriteria efisiennya 69,58-46,40 persen.

Ha2 :Rasio efektivitas pendapatan asli daerah pada dinas pengelola keuangan dan asset daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2008-2011 tidak efisien kriteria tidak efisiennya 101,52-734,23 persen.

Ho3 :Rasio pertumbuhan pada dinas pengelola keuangan dan asset daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2010-2015 sudah efisien kriteria efisiennya 22,21-80 persen.

Ha3 :Rasio pertumbuhan pada dinas pengelola keuangan dan asset daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2008-2009 tidak efisien kriteria tidak efisiennya 140,87-218,66 persen.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif menurut Sugiono penelitian kualitatif adalah “jenis penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar”.¹ Sedangkan penelitian kuantitatif deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka dan karakteristik sesuatu sebagaimana adanya, serta hasil dari perhitungan dan pengukuran. Dimana data kuantitatif terdiri dari data interval dan rasio.

Metode Deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Payaloting Panyabungan . Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret- Oktober Tahun 2017.

¹ Sugyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm. 15.

²Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skirip* (Padangsidimpuan: STAIN 2012), hal. 63.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiono populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.³ Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran tahun 2008-2015 pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

2. Sampel

Menurut Sugiono sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.⁴ Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. kriteria penarikan sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran yang dilihat dari rasio-rasio kinerja keuangan Kabupaten Mandailing Natal, tahun 2008-2015 yang dianggap sudah mewakili untuk dilakukan penelitian.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Menurut Suharsimi Arikunto Instrumen adalah “alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya,

³ Sugyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 72.

⁴ *Ibid.*, hlm. 73.

atau alat bantu bagi peneliti didalam menggunakan metode pengumpulan data”.⁵

Penelitian ini dilakukan dengan cara pencarian data skunder dan data primer dengan mengumpulkan data dengan cara :

a) Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan diruang data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, majalah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.⁶

b) Dokumentasi

mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti dengan menggunakan dokumentasi. Metode dokumentasi ini melakukan pengumpulan data dari Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kabupaten Mandailing Natal berupa data umum dan data khusus. Data umum berupa :

1. Gambaran umum Kabupaten Mandailing Natal
2. Gambaran umum DPKAD Kabupaten Mandailing Natal

Dan data khusus berupa laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun anggaran 2008-2015.

⁵Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 101.

⁶*Ibid.*, hal. 134.

c) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai. Kedudukan kedua pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses tanyajawab berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak yang biasa berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu proses dialog sedang berlangsung.⁷ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan bapak Abdul Hamid sebagai bendahara dalam dinas pengelola keuangan dan asset daerah Kabupaten Mandailing Natal.⁸

E. Sumber Data

Dilihat dari segi sumber perolehan data, atau dari mana data tersebut berasal secara umum dalam penelitian dikenal ada 2 jenis data, yaitu data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Kedua jenis data ini selalu dipakai oleh para peneliti dalam penelitiannya dalam usaha membuat solusi atau menemukan jawaban terhadap pokok-pokok persoalan yang ditelitinya, baik digunakan secara bersama-sama ataupun secara terpisah.⁹

⁷Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2011), hal. 65.

⁸ Wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, (Bendahara) Mengenai Tugas dan Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mandailing Natal Hari Selasa, 23 Agustus 2017 Pukul 10.35 WIB.

⁹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm. 121.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa publikasi dari Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mandailing Natal serta bentuk Laporan Realisasi Anggaran tahun 2008-2015. Dan data primer memahami visi misi serta tugas dan struktur dinas pengelola keuangan dan asset daerah Kabupaten Mandailing Natal.

F. Pengujian Hipotesis

1. Uji Statistik Nonparametrik

Istilah nonparametrik pertama kali digunakan oleh Wolfowitz, pada tahun 1942. Metode statistik nonparametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Istilah lain yang sering digunakan untuk statistik nonparametrik adalah statistik bebas distribusi (*distribution free statistics*) dan uji bebas asumsi (*assumption-free test*). Statistik nonparametrik banyak digunakan pada penelitian-penelitian sosial.

Statistik nonparametrik tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi berdistribusi normal. Statistik nonparametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal karena pada umumnya data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal.

Uji nonparametrik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan korelasi dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 22.

Dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji statistik nonparametrik dalam dua bagian yaitu :

a. Chi-Square

Chi Square adalah salah satu jenis uji komparatif nonparametrik yang dilakukan pada dua variabel, dimana skala data kedua variabel adalah nominal. Chi-Square digunakan untuk menguji perbedaan antara frekuensi pengamatan dan frekuensi yang diharapkan. Prosedur tes Chi-Square mentabulasi variabel ke dalam kategori-kategori dan melakukan tes hipotesis bahwa frekuensi yang diamati tidak berbeda dengan nilai yang diharapkan.¹⁰

Dalam statistik, distribusi chi square termasuk dalam statistik nonparametrik. Distribusi nonparametrik adalah distribusi dimana besaran-besaran populasi tidak diketahui. Distribusi ini sangat bermanfaat dalam melakukan analisis statistik jika kita tidak memiliki informasi tentang populasi atau jika asumsi-asumsi yang dipersyaratkan untuk penggunaan statistik parametrik tidak terpenuhi.

¹⁰ Djarwanto, *Statistik Nonparametrik* (Yogyakarta: BPFE, 1991), hlm. 182

b. Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov

Uji Kolmogorov Smirnov merupakan pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Konsep dasar dari uji normalitas kolmogorov smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan di uji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah di transformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji kolmogorov smirnov adalah uji beda antara data yang di uji normalitasnya dengan data normal baku.¹¹ Uji nonrmlalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan one-smple kolmogorov- smirnov test dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 22.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, setelah data terkumpul selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka hasil perhitungan dapat diproses dengan cara di klasifikasikan dan di analisis. Dalam teknis uji nonparametrik serta dengan uji asumsi klasik kolmogorov-smirnov peneliti menggunakan SPSS *Versi 22* dan menggunakan analisis rasio-rasio Kinerja Keuangan daerah.

¹¹ Ghozali, *Pengenalan SPSS*, (Jakarta: Hak Cipta, 2001), hlm. 19-22

1. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk metode deskriptif yaitu metode yang bertujuan mengumpulkan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Menurut Mohammad Nazir Penelitian deskriptif adalah “studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat”.¹²

2. Analisis Data

Metode ini menerapkan konsep perhitungan rasio keuangan, yaitu dengan menghitung rasio keuangan dari pos-pos dalam realisasi anggaran yang tertuang dalam laporan realisasi anggaran untuk kinerja keuangan tahun anggaran 2008-2015. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja keuangan Kabupaten Mandailing Natal dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan rasio-rasio. Sebagai berikut:

a. Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio ini menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

¹²Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 89.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}}$$

b. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah

Rasio efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya tersebut. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka dikatakan efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah berjalan dengan efektif.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

c. Rasio pertumbuhan

Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.¹³

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\text{PAD}_{t1} - \text{PAD}_{t0}}{\text{PAD}_{t0}}$$

dimana: t0 = tahun awal

t1 = tahun akhir

¹³ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hlm. 278-284.

d. Rasio efisiensi PAD

Rasio efisiensi merupakan hal terpenting di antara ketiga hal tersebut. Suatu organisasi dikatakan efisien apabila rasio efisiensi cenderung di atas satu atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakinbaik.¹⁴

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{realisasi Penerimaan PAD}}$$

H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik menguji keabsahan data sebagai berikut:

a. Triangulasi

Menurut Sugiono Triangulasi adalah“diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dari berbagi cara dan berbagai waktu, dengan demikian triangulasi dapat disimpulkan sebagai sebagai teknik pengumpulan data dan waktu penelitian agar lebih memfokuskan data yang diperlukan”.¹⁵ data yang diperlukan peneliti mengecek keabsahan data laporan keuangan Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 279

¹⁵ Sugyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, Cetakan Sembilan, 2006)

b. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah bahan untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti misalkan sumber referensi buku-buku ataupun artikel-artikel yang berkaitan dengan Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.

c. Ketekunan Pengamatan

Dalam hal ini ketekunan pengamatan bertujuan untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak. Demikian juga meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis dari yang diamati.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Gambaran umum yang akan dijelaskan di sini adalah gambaran umum baik letak geografis, letak administratif, sejarah, visi misi, tugas dan fungsi serta struktur organisasi dari dinas pengelola keuangan dan asset daerah yang menjadi objek penelitian ini. Gambaran umum tersebut adalah sebagai berikut.

1. Letak Geografis Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten dikawasan pantai barat sumatera utara. Daerah ini terletak antara 0'-1'15 Lintang Utara dan 98'-100' Bujur Timur, pada ketinggian 2.145 m diatas permukaan laut dengan luas wilayah 6.620 km atau 9,23 persen dari wilayah sumatera utara.

2. Letak Administratif Kabupaten Mandailing Natal

Adapun batas wilayah Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara Kabupaten Tapanuli Selatan
- b. Sebelah selatan provinsi sumatera barat
- c. Sebelah timur provinsi sumatera barat
- d. Sebelah barat sumatera indonesia

3. Sejarah Singkat Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Madina merupakan salah satu daerah otonom yang berdiri di wilayah provinsi Sumatera Utara. Dibentuk sebagai undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1998, dimana sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Madina sebagai daerah otonom setelah terpisah dari Kabupaten Induk (Tapanuli Selatan), maka kewenangan otonomi daerah dan segala kegiatan penyelenggaraan pemerintah telah dilaksanakan sendiri oleh Kabupaten Madina, sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat sebagaimana diatur menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan keputusan Bupati Mandailing Natal, Nomor 2 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, maka dibentuklah susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Mandailing Natal, yang di dalam keputusan tersebut juga termasuk dinas pengelola keuangan dan asset daerah.

4. Visi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Visi yang menjadi arah pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mandailing

Natal adalah: Menjadi Lembaga Pengelola Keuangan dan Asset Profesional, Akuntabel dan Berintegritas.

5. Misi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Misi ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan asset yang profesional dan modren.
- b. Meningkatkan akuntabilitas manajemen keuangan daerah
- c. Meningkatkan kemandirian sumber-sumber keuangan daerah
- d. Meningkatkan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia yang amanah dan berintegritas.

6. Tugas dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Dinas pengelola keuangan dan asset daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah.

- c) Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah sesuai kebijakan daerah, ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- d) Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan administrasi ketatausahaan dinas.
- e) Penyelenggaraan pembinaan disiplin pegawai dinas.
- f) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- g) Pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- h) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan.
- i) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

7. Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan keputusan bupati Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mandailing Natal, berikut adalah susunan organisasinya :

- a. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- b. Sekretariat

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
- c. Bidang Anggaran
1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
 2. Seksi Verifikasi
 3. Seksi Pengendalian Anggaran
- d. Bidang Perbendaharaan dan Gaji
1. Seksi Perbendaharaan
 2. Seksi Kas Daerah
 3. Seksi Gaji
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
1. Seksi Akuntansi dan Pembukuan
 2. Seksi Laporan Keuangan
 3. Seksi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- f. Bidang Pendapatan Asli Daerah
1. Seksi Pendataan dan Penetapan
 2. Seksi Penagihan dan Layanan Pengaduan
 3. Seksi Penggalian dan Pengembangan Potensi PAD
- g. Bidang Pendapatan Lain-Lain
1. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
 2. Seksi Pendapatan Lainnya
 3. Seksi Perhitungan dan Sinkronisasi PLL

- h. Bidang Aset dan Kekayaan Daerah
 - 1. Seksi Inventarisasi Aset dan Kekayaan Daerah
 - 2. Seksi Analisa Kebutuhan Barang, Pengadaan dan Pendistribusian.
 - 3. Seksi Pengendalian dan Perawatan.
- i. Unit pelaksana teknis
- j. Kelompok jabatan fungsional

B. Hasil Penelitian

1. Uji Statistik Nonparametrik

Istilah nonparametrik pertama kali digunakan oleh Wolfowitz, pada tahun 1942. Metode statistik nonparametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal.

Istilah lain yang sering digunakan untuk statistik nonparametrik adalah statistik bebas distribusi (distribution free statistics) dan uji bebas asumsi (assumption-free test). Statistik nonparametrik banyak digunakan pada penelitian-penelitian sosial. Data yang diperoleh dalam penelitian sosial pada umumnya berbentuk kategori atau berbentuk rangking.

Uji statistik nonparametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi.¹ Uji statistik ini disebut juga sebagai statistik bebas sebaran (distribution free). Statistik nonparametrik tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi berdistribusi normal. Statistik nonparametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal karena pada umumnya data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal.

Sedangkan pengertian uji nonparametrik menurut penulis adalah metode yang tidak mendasarkan pada asumsi distribusi populasi. Dalam arti sempit non-parametrik adalah sebuah kategori nol karena hampir semua uji statistik mengasumsikan satu atau lain hal tentang sifat-sifat populasi.

Adapun hasil uji statistik nonparametrik dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

¹ Djarwanto, *Statistik Nonparametrik* (Yogyakarta: BPFE, 1991), hlm. 21-22

Tabel 4. 1
Nonparametrik Correlations

		rasio_kemandirian	rasio_efektifitas	rasio_pertumbuhan	rasio_efisiensi_PAD
Spearman's rho	Correlation Coefficient	1.000	.000	.143	-.548
	Sig. (2-tailed)	.	1.000	.736	.160
	N	8	8	8	8
rasio_efektifitas	Correlation Coefficient	.000	1.000	.024	.214
	Sig. (2-tailed)	1.000	.	.955	.610
	N	8	8	8	8
rasio_pertumbuhan	Correlation Coefficient	.143	.024	1.000	-.286
	Sig. (2-tailed)	.736	.955	.	.493
	N	8	8	8	8
rasio_efisiensi_PAD	Correlation Coefficient	-.548	.214	-.286	1.000
	Sig. (2-tailed)	.160	.610	.493	.
	N	8	8	8	8

Sumber : Hasil penelitian (data diolah 2017)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi ke empat variabel tersebut independen dengan dependen lebih dari 0,05.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah pada statistik nonparametriknya.

Uji statistik nonparametrik terdapat dalam beberapa bagian yaitu :

a. Chi-Square

Chi-Square digunakan untuk menguji perbedaan antara frekuensi pengamatan dan frekuensi yang diharapkan. Prosedur tes Chi-Square mentabulasi variabel ke dalam kategori-kategori dan melakukan tes hipotesis bahwa frekuensi yang diamati tidak berbeda dengan nilai yang diharapkan.²

Adapun hasil uji statistik nonparametrik dengan menggunakan Chi-Square dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Frekuensi
Tabel 4. 2
Rasio Kemandirian

	Observed N	Expected N	Residual
40.91	283	79.2	203.8
60.48	18	79.2	-61.2
80.44	166	79.2	86.8
81.85	56	79.2	-23.2
178.65	20	79.2	-59.2
198.18	11	79.2	-68.2
198.93	73	79.2	-6.2
552.83	7	79.2	-72.2
Total	634		

² *Ibid.*, hlm. 182

Tabel 4. 3
Rasio Efektivitas

	Observed N	Expected N	Residual
46.4	7	79.2	-72.2
50.19	20	79.2	-59.2
69.58	56	79.2	-23.2
100.28	283	79.2	203.8
101.23	18	79.2	-61.2
101.52	166	79.2	86.8
136.51	73	79.2	-6.2
734.23	11	79.2	-68.2
Total	634		

Tabel 4. 4
Rasio Pertumbuhan

	Observed N	Expected N	Residual
0.53	20	79.2	-59.2
7.49	56	79.2	-23.2
14.87	166	79.2	86.8
22.21	73	79.2	-6.2
35.14	18	79.2	-61.2
80	11	79.2	-68.2
218.66	283	79.2	203.8
552.83	7	79.2	-72.2
Total	634		

Tabel 4. 5
Test Statistics

	rasio kemandirian	rasio efektivitas	rasio pertumbuhan
Chi-Square	842.391 ^a	842.391 ^a	842.391 ^a
Df	7	7	7
Asymp. Sig.	.000	.000	.000

Tabel 4. 5
Test Statistics

	rasio kemandirian	rasio efektifitas	rasio pertumbuhan
Chi-Square	842.391 ^a	842.391 ^a	842.391 ^a
Df	7	7	7
Asymp. Sig.	.000	.000	.000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5.
The minimum expected cell frequency is 79.3.

Kolom residual merupakan selisih frekuensi pengamatan dengan frekuensi yang diharapkan. Tabel test statistik memaparkan uji hipotesis.

Ho = frekuensi pengamatan dengan frekuensi yang diharapkan sama

H1 =frekuensi pengamatan dengan frekuensi yang diharapkan tidak sama Nilai x^2 kuadrat hitung 842.391

Disamping menggunakan perbandingan x^2 hitung dengan x^2 tabel, dapat juga dilakukan perbandingan Asymp sig dengan α . Dan hasil dari Asymp Sig (0.000) < α (0.05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada kaitan yang signifikan antara kinerja keuangan terhadap efisiensi pendapatan asli daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji Chi square adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi atau yang benar-benar terjadi atau aktual dengan frekuensi harapan.

Yang dimaksud dengan frekuensi harapan adalah frekuensi yang nilainya dapat di hitung secara teoritis (e), sedangkan dengan frekuensi observasi adalah frekuensi yang nilainya di dapat dari hasil percobaan (o).

b. One-Sample Kolmogorov-Smirnov

Uji one-sample kolmogorov-smirnov merupakan pengujian normalitas yang banyak di pakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik

Konsep dasar dari uji normalitas kolmogorov-smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan di uji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Normal baku adalah data yang telah di transformasikan ke dalam bentuk Z-score dan di asumsikan normal. Jadi sebenarnya uji kolmogorov-smirnov adalah uji beda antara data yang di uji normalitasnya dengan data normal baku.

Ada bermacam-macam cara untuk mendeteksi normalitas distribusi data, salah satunya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H_0 : Data X berdistribusi normal.

H_a : Data X tidak berdistribusi normal

Keputusan yang diambil dari uji statistik nonparametrik one-sample kolmogorov-smirnov adalah :

Data berdistribusi normal, jika nilai signifikansi $> 0,05$

Data berdistribusi tidak normal, jika nilai signifikansi $< 0,05$

Adapun hasil uji statistik nonparametrik dengan menggunakan one- sample kolmogorov-smirnov dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 6
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		rasio_kem andirian	rasio_efek tifitas	rasio_pert umbuhan	rasio_efis iensi_PA D
N		8	8	8	8
Normal Parametersa	Mean	177.0338	167.4925	116.4662	79.3650
	Std.				
	Deviasi on	164.14118	230.96754	190.23433	97.45773
Most Extreme Differences	Absolut e	.322	.428	.326	.275
	Positive	.212	.132	.343	.135
	Negativ e	-.203	-.300	-.271	-.230
Kolmogorov-Smirnov Z		.911	1.212	.922	.778
Asymp. Sig. (2-tailed)		.378	.106	.363	.581

Test distribution is Normal.

Most Extreme Differences merupakan perbedaan nilai fungsi distribusi kumulatif pengamatan dan teoritis. Nilai absolute (0.428) adalah nilai mutlak terbesar dari nilai perbedaan positive (0.343) dan negativ (-0.300). Nilai Asymp Sig (2-tailed) adalah $0.581 > 0.05$

sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, jadi model berdistribusi normal sesuai.

Prosedur One-Sample Kolmogorov-Smirnov akan membandingkan fungsi distribusi kumulatif observasi untuk sebuah variabel dengan sebuah distribusi teoritis yang telah ditentukan, misalnya distribusi normal, uniform, atau Poison. Z dari Kolmogorov-Smirnov dihitung dari selisih terbesar (dalam harga absolut) antara observasi dan fungsi distribusi teoritis.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis uji statistik nonparametrik dapat diketahui bahwa nilai signifikansi ke empat variabel tersebut independen dengan dependen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah pada statistik nonparametriknya.

Sedangkan hasil penelitian analisis dari uji Chi-Square menunjukkan bahwa rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan nilai Asymp Sig (0.000) < α (0.05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada kaitan yang signifikan antara kinerja keuangan terhadap efisiensi pendapatan asli daerah. Dan dapat disimpulkan bahwa uji Chi square adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi atau yang benar-benar terjadi atau aktual dengan frekuensi harapan.

Dan hasil analisis dari one-sample kolmogrof-smirnof nilai absolute (0.428) adalah nilai mutlak terbesar dari nilai perbedaan positif (0.343) dan negatif (-0.300). Nilai Asymp Sig (2-tailed) adalah 0.581 > 0.05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi model berdistribusi normal sesuai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan tentang analisis kinerja keuangan terhadap efisiensi pendapatan asli daerah.

Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Hasil uji statistik nonparametrik nilai signifikansi variabel independen dengan dependen lebih dari 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah pada statistik nonparametrik antara kinerja keuangan terhadap efisiensi PAD.
2. Hasil uji chi-square dalam penelitian ini dilihat dari H_0 = frekuensi pengamatan dengan frekuensi yang diharapkan sama. Sedangkan H_1 = frekuensi pengamatan dengan frekuensi yang diharapkan tidak sama. Nilai χ^2 kuadrat hitung 842.391. jadi nilai Asymp Sig 0.000 < α 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada kaitan yang signifikan antara kinerja keuangan terhadap efisiensi pendapatan asli daerah
3. Hasil one sample kolmogorof-smirnof dalam penelitian ini dilihat dari nilai absolute (0.428) adalah nilai mutlak terbesar dari nilai perbedaan positif (0.343) dan negatif (-0.300). Nilai Asymp Sig (2-tailed) adalah 0.581 > 0.05 sehingga H_0 ditolak. Jadi model berdistribusi normal sesuai.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis rasio dan uji hipotesis kinerja keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal serta beberapa kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang sekiranya bisa dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka meningkatkan kinerja keuangannya, antara lain:

1. Kinerja keuangan dilihat dari hasil uji Chi-Square nilai Asymp Sig $0.000 < \alpha 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga pemerintah perlu mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstren dapat diminimalisir.
2. Meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah ataupun dengan melakukan perekrutan pegawai yang ahli dalam bidang keuangan.
3. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah sampel dan variabel penelitian diusahakan agar sampel penelitian yang diambil dibedakan dari penelitian ini. Agar variabel tersebut berpengaruh terhadap efisiensi PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011
- Alqur'an dan Terjemahannya
- Afriyanto, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Rokan Hulu Periode Tahun 2007-2011" *Jurnal*, Universitas Pasir Pengaraian.
- Ahmad Mushthafa Al,Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: Penerbit Toha Putra, 1999.
- Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Blu*, jakarta: PT Macanan jaya cemerlang, 2009.
- Djarwanto, *Statistik Nonparametrik*, Yogyakarta: BPF, 1991.
- Ghozali, *Pengenalan SPSS*, Jakarta: Hak Cipta, 2001.
- Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Ibnu Syamsi, *efisiensi, sistem, dan prosedur kerja*, jakarta: Bumi aksara, 2004.
- Irwan Taufik Ritonga, *Akuntansi Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2010.
- Jumingan, *analisis laporan keuangan*, jakarta: Bumi aksara, 2006.
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Muhammad Yogi Perwira, "Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sidoarjo Periode 2007-2013". *Jurnal*, Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- Bayu Andri Setiyawan "Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo periode 2007-2011". *Jurnal*, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin.

- Sofyan Syafri, *analisis atas laporan keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sunarno Siswanto, *hukum pemerintahan daerah*, jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sugyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Cv Alfabeta, 2006.
- _____, *Metode Penelitian Bisnis* Bandung: Alfabeta, 2012.
- _____, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- Surya Dharma MPA, *Manajemen Kinerja*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Wibowo, *Manajemen Kinerja edisi kedua*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Sumatera Utara,
KodePos 22978 Telp (0636) 326181 Faks, (0636) 326182
E-mail : bpkpadpvb@gmail.com Website www.madina.go.id

Panyabungan, 04 September 2017

Nomor : 900/1647/BPKPAD/2017
Sifat : -
Lamp : -
Perihal : Izin Pra Riset

Kepada Yth :
Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
di-

Tempat


Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor : B-1019/In. 14/G/TL.00/8/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 Perihal Mohon Izin Pra Riset.

Berkenaan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah kepada :

Nama : JULIANI NASUTION
Nim : 13 230 0242
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Mahasiswa/i : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH


KAMAL RANGKUTI, S.Sos.MM
PEMBINA
NIP. 19701228 199402 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Sumatera Utara,
KodePos 22978 Telp (0636) 326181 Faks, (0636) 326182
E-mail : bpkpadpyb@gmail.com Website www.madina.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 900/136/BPKPAD/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KAMAL RANGKUTI, S.Sos. MM
NIP : 19701228 199402 1 001
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Mandailing Natal
Alamat : Panyabungan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

Nama : JULIANI NASUTION
Nim : 13 230 0242
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Mahasiswa/i : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan

Telah selesai melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "ANALISIS KINERJA KEUANGAN TERHADAP EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Panyabungan, 27 September 2017
Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KAMAL RANGKUTI, S.Sos.MM
PEMBINA
NIP. 19701228 199402 1 001

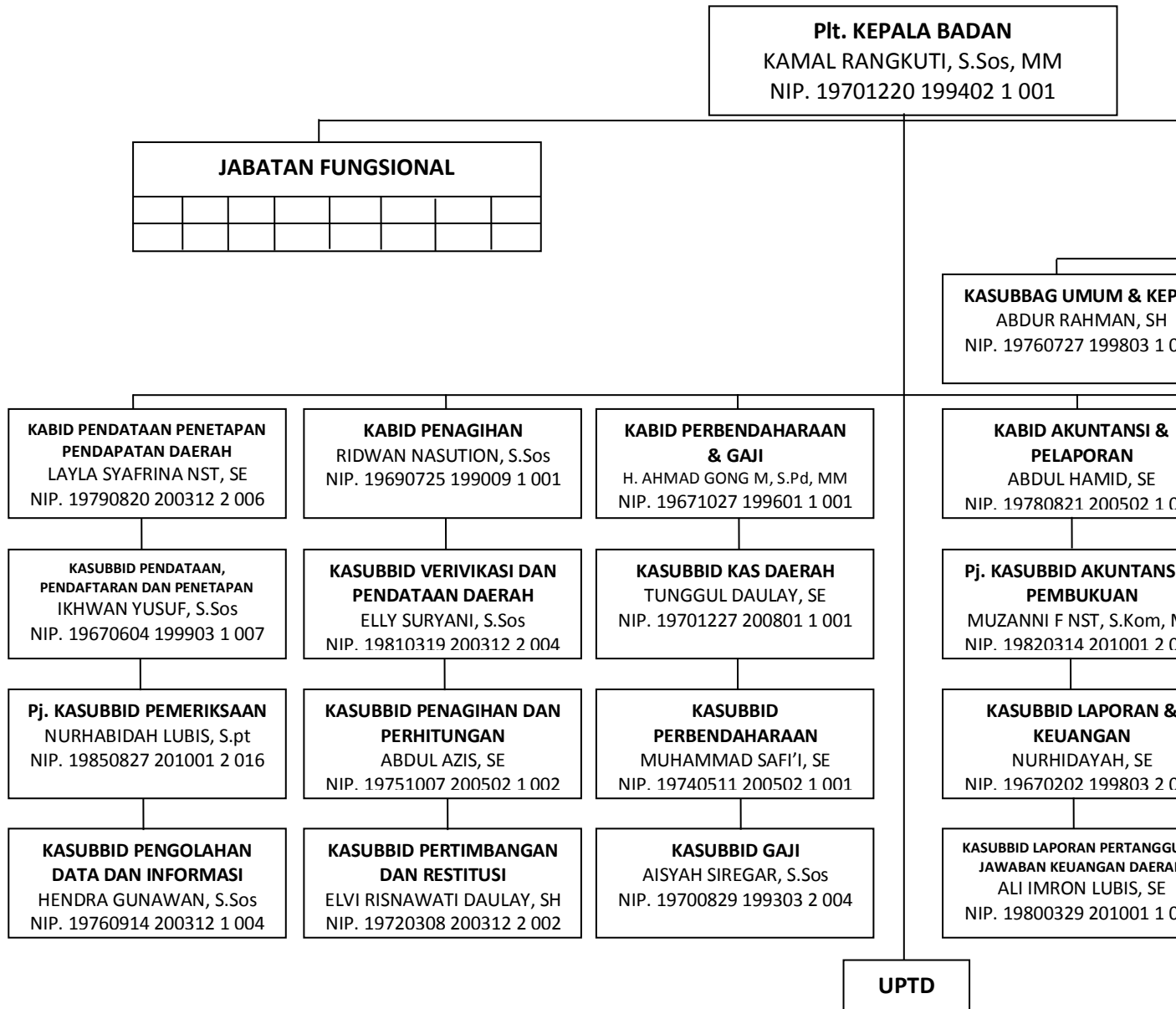
Lampiran 1**Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008-2015**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD
2008	11.847.943.635	11.343.750.000	575.049.782.701	566.386.243.682	953.614.708
2009	10.085.650.256	24.650.590.800	10.085.650.256	540.553.847.536	28.510.742.504
2010	32.138.982.914	16.155.680.000	11.825.857.863	8.662.612.838	8.662.612.838
2011	25.000.000.000	12.614.160.000	27.525.847.376	3.748.895.028	2.900.000.000
2012	45.000.000.000	54.974.152.000	21.274.113.486	30.570.994.373	12.000.000.000
2013	48.372.029.954	79.975.772.609	47.665.840.298	47.083.513.223	8.800.000.000
2014	65.372.000.000	36.591.446.609	44.119.212.260	87.900.415.643	9.700.000.000
2015	65.720.594.820	11.887.907.000	63.847.458.130	137.574.131.694	4.700.000.000

**Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008-2015**

Tahun	PAD t0	PADt1
2008-2009	11.847.943.635	10.085.650.256
2009-2010	10.085.650.256	32.138.982.914
2010-2011	32.138.982.914	25.000.000.000
2011-2012	25.000.000.000	45.000.000.000
2012-2013	45.000.000.000	48.372.029.954
2013-2014	48.372.029.954	65.372.000.000
2014-2015	65.372.000.000	65.720.594.820

**BAGIAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH**



Lampiran 3

Dokumentasi dengan Bapak Abdul Hamid pada saat melihat laporan keuangan tahunan



Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Mandailing Natal



Lokasi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten

Mandailing Natal



Lampiran 4

Hasil Olah Data Statistik Nonparametrik (SPSS)

Nonparametrik Correlations

			rasio_kemandirian	rasio_efektifitas	rasio_pertumbuhan	rasio_efisiensi_PAD
Spearman's rho	rasio_kemandirian	Correlation Coefficient	1.000	.000	.143	-.548
		Sig. (2-tailed)	.	1.000	.736	.160
		N	8	8	8	8
	rasio_efektifitas	Correlation Coefficient	.000	1.000	.024	.214
		Sig. (2-tailed)	1.000	.	.955	.610
		N	8	8	8	8
	rasio_pertumbuhan	Correlation Coefficient	.143	.024	1.000	-.286
		Sig. (2-tailed)	.736	.955	.	.493
		N	8	8	8	8
	rasio_efisiensi_PAD	Correlation Coefficient	-.548	.214	-.286	1.000
		Sig. (2-tailed)	.160	.610	.493	.
		N	8	8	8	8

Frekuensi Rasio Kemandirian

	Observed N	Expected N	Residual
40.91	283	79.2	203.8
60.48	18	79.2	-61.2
80.44	166	79.2	86.8
81.85	56	79.2	-23.2
178.65	20	79.2	-59.2
198.18	11	79.2	-68.2
198.93	73	79.2	-6.2
552.83	7	79.2	-72.2
Total	634		

Rasio Efektivitas

	Observed N	Expected N	Residual
46.4	7	79.2	-72.2
50.19	20	79.2	-59.2
69.58	56	79.2	-23.2
100.28	283	79.2	203.8
101.23	18	79.2	-61.2
101.52	166	79.2	86.8
136.51	73	79.2	-6.2
734.23	11	79.2	-68.2
Total	634		

Rasio Pertumbuhan

	Observed N	Expected N	Residual
0.53	20	79.2	-59.2
7.49	56	79.2	-23.2
14.87	166	79.2	86.8
22.21	73	79.2	-6.2
35.14	18	79.2	-61.2
80	11	79.2	-68.2
218.66	283	79.2	203.8
552.83	7	79.2	-72.2
Total	634		

Tabel 4. 6
Test Statistics

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		rasio_kem andirian	rasio_efek tifitas	rasio_pert umbuhan	rasio_efis iensi_PA D
N		8	8	8	8
Normal Parametersa	Mean	177.0338	167.4925	116.4662	79.3650
	Std. Deviation	164.14118	230.96754	190.23433	97.45773
	Most Extreme Differences				
	Absolute	.322	.428	.326	.275
	Positive	.212	.132	.343	.135
	Negative	-.203	-.300	-.271	-.230
Kolmogorov-Smirnov Z		.911	1.212	.922	.778
Asymp. Sig. (2-tailed)		.378	.106	.363	.581

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Juliani Nasution
NIM : 13 230 0242
Tempat/ Tgl Lahir : Rantobi, 16 Juni 1994
Alamat Rumah : Desa Rantobi, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal
Alamat Kost : JL. H. T. Rizal Nurdin, k.m 4,5 Gang Sinar, Kel. Sihitang

B. Pendidikan

- SD NEGERI NO. 142696 RANTOBI, LULUS TAHUN 2007
- SMP NEGERI 3 BATANG NATAL, LULUS TAHUN 2010
- SMA NEGERI 1 BATANG NATAL, LULUS TAHUN 2013
- IAIN PADANGSIDIMPUAN, LULUS TAHUN 2017

NOMOR TELEPHON : 0823-7004-3530
ALAMAT @MAIL : Juliani_nasution@gmail.com

C. DATA ORANGTUA

1. Nama :
 - AYAH : ZAINAL ABIDIN
 - PEKERJAAN : TANI
 - ALAMAT : RANTOBI
 - PENDIDIKAN : SMP
2. IBU :
 - NAMA : MASTIAR LUBIS
 - PEKERJAAN : TANI
 - ALAMAT : RANTOBI
 - PENDIDIKAN : SMP